




DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI
TENGAH

LAPORAN RENCANA KERJA (RENJA)

2026

 Jalan Prof.Moh.Yamin No.17 Palu

 www.dpp.sultengprov.go.id

 (0451) 8454711 Fax.(0451)8454711

 dispang@sultengprov.go.id

KATA PENGANTAR

Pangan merupakan prasyarat utama dalam membangun dan menciptakan sumberdaya yang handal dan berkualitas. Kompleksnya persoalan pangan ditingkat wilayah harus diatasi dengan perencanaan yang komprehensif dan simultan serta melibatkan seluruh komponen masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 disusun dalam rangka menjawab berbagai persoalan yang begitu kompleks disektor pangan dan pada sisi lain merupakan upaya untuk mendukung tercapainya Visi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah “Berani mewujudkan Sulawesi Tengah menjadi Daerah Pertanian dan Industri yang Maju dan berkelanjutan 2025- 2029” melalui pendekatan 9 Berani. Fokus utama meliputi penguatan sektor pertanian/ perkebunan, peningkatan SDM, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, tata kelola Pemerintah dan Investasi. Renja Dinas Pangan Tahun 2026 juga merupakan acuan dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dibidang ketahanan pangan.

Dalam penyusunan Renja Tahun 2026 telah disesuaikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI sehingga muatan Renja akan secara signifikan membantu tercapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pangan.

Disadari bahwa materi dan teknik penyusunan yang disajikan dalam Rencana Kerja ini cakupannya belum maksimal, serta alat analisis yang digunakan masih sangat sederhana sehingga diperlukan adanya kajian yang lebih mendalam tentang metode pengumpulan, pengolahan/estimasi serta analisis data. Untuk itu, kami mengharapkan agar seluruh pihak yang berkompeten dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat konstruktif, sehingga dalam penyusunan Renja Dinas Pangan pada masa mendatang akan lebih baik dan sempurna.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 kami ucapkan terimakasih yang sebesar - besarnya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palu, Desember 2025

**Plt.KEPALA DINAS PANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Rustam Aripuddin, S.Ag.,M.Si
NIP. 19710112 199803 1 012

BAB I. PENDAHULUAN

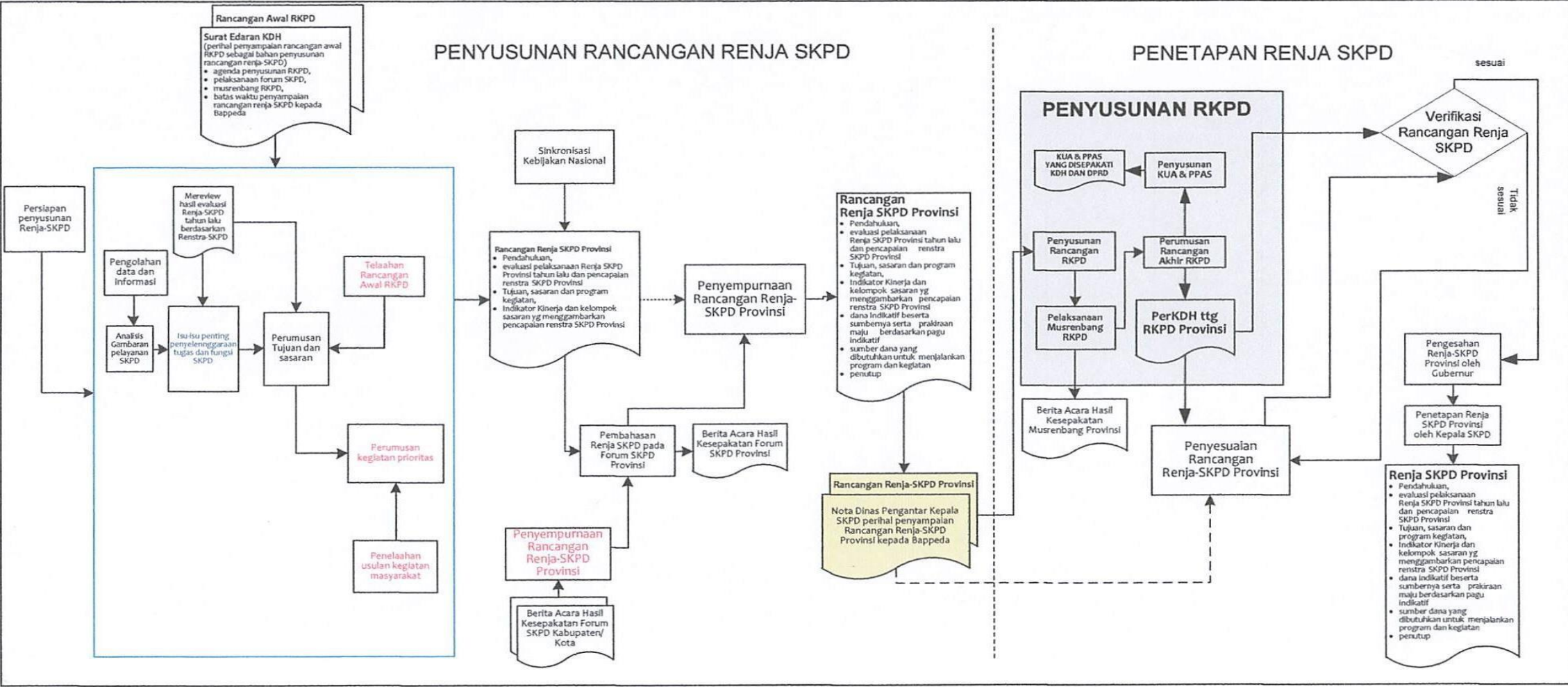
1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang disusun sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk Periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan melihat hasil kinerja perangkat daerah yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, fenomena yang terjadi saat ini dan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah, sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Adapun secara umum hubungan dokumen Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.a
Bagan alur Tahapan Penyusunan Renja OPD Provinsi



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ; 273/KPTS/OT.160/4/2007 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ;
16. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
17. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Pemendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 13 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 63 tahun 2016 Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 adalah untuk ;
 - Mengkorelasikan antara dokumen Perencanaan Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah
 - Menjadikan Dokumen Rencana Kerja sebagai dasar perumusan target kinerja dan penganggaran program kegiatan demi terwujudnya optimalisasi pencapaian manfaat.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan rencana kerja adalah untuk memudahkan pelaksanaan program kegiatan dan menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk kepala Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah dan semua jajarannya yang ada dalam mengendalikan dan memutuskan kebijakan pembangunan pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah dan merupakan break down dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). serta berpedoman pada Renstra 2025 - 2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggara Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PANGAN PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah penjabaran Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Pangan.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025.

Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 18.621.700.402,67-** dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar **Rp. 15.146.211.255,00,-** atau sebesar **(81,34%)** dengan capaian keuangan sebesar **Rp. 15.058.164.312,92** atau sebesar **(80,86%)** Tahun 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan 4 (Empat) target capaian kinerja dan 19 (Sembilan Belas) indikator output, Rincian Capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan. Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	32 Unit	32 Unit
	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	1 laporan
2.	Tersedianya Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	4 Unit	4 Unit

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	1 Laporan
2.	Tersedianya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan
3.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Laporan	1 Laporan
4.	Tersusunnya Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	4 Unit	4 Unit
5.	Tersedianya Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
6.	Tersedianya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	376.67 Ton	376.67 Ton
7.	Tersedianya Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan
8.	Tersedianya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen
9.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	1 Laporan
10.	Tersedianya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	1 Laporan	1 Laporan

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Tersedianya Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	1 Dokumen

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, adapun keluaran dari kegiatan ini adalah :

No.	Keluaran/Output	Target	Realisasi
1.	Tersedianya Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	83 Sertifikat	81 Sertifikat
2.	Tersedianya Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen
3.	Tersedianya Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten / Kota yang Diterbitkan	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Tersedianya Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen	1 Dokumen

**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DINAS PANGAN
S/D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025**

**Tabel 1. Realisasi Anggaran
SEKRETARIAT**

NO.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET S/D DESEMBER		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			Rp	%	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	14
1	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	110,735,400.00	110,735,400.00	100.00	100,023,480	90.33	100,023,480	90.33	10,711,920	9.67	10,711,920	9.67
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	15,315,375.00	15,315,375.00	100.00	14,699,008	95.98	14,699,008	95.98	616,367	4.02	616,367	4.02
3	Koordinasi dan penyusunan Perubahan RKA SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	3,683,600.00	3,683,600	100.00	3,682,700	99.98	3,682,700	99.98	900	0.02	900	0.02
5	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	7,874,500.00	7,874,500.00	100.00	7,526,426	95.58	7,526,426	95.58	348,074	-	348,074	4.42
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	113,089,950.00	113,089,950.00	100.00	109,438,060	96.77	109,438,060	96.77	3,651,890	3.23	3,651,890	3.23
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141,193,750.00	141,193,750	100.00	129,350,650	91.61	132,350,650	93.74	11,843,100	-	11,843,100	8.39
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,798,052,570.34	8,798,052,570.34	100.00	6,401,431,852	72.76	6,401,431,852	72.76	2,396,620,718	27.24	2,396,620,718	27.24
9	Peyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	1,644,390,000.00	1,644,390,000.00	100.00	1,635,150,000	99.44	1,635,150,000	99.44	9,240,000	0.56	9,240,000	0.56
10	Koordinasi dan penyusunan Lap. Keuangan Akhir Tahun SKPD	65,819,850.00	65,819,850.00	100.00	58,477,647	88.85	58,477,647	88.85	7,342,203	11.15	7,342,203	11.15
11	Peny. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4,529,700.00	4,529,700	100.00	3,201,786	70.68	3,201,786	70.68	1,327,914	29.32	1,327,914	29.32
12	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	81,425,000.00	81,425,000.00	100.00	74,448,080	91.43	74,448,080	91.43	6,976,920	-	6,976,920	8.57

13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-							-		-	
14	Penyediaan komponen instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	16,376,129.00	16,376,129.00	100.00	16,074,500	98.16	16,376,129	100.00	301,629	1.84	301,629	1.84
15	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	49,940,700.00	49,940,700.00	100.00	47,728,373	95.57	47,728,373	95.57	2,212,327	4.43	2,212,327	4.43
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	163,454,000.00	163,454,000	100.00	137,980,000	84.42	137,980,000	84.42	25,474,000	15.58	25,474,000	15.58
17	Pengadaan Mebel	-		-		-			-		-	-
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	168,253,670.00	168,253,670	100.00	153,650,085	91.32	153,650,085	91.32	14,603,585	8.68	14,603,585	8.68
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	232,196,168.00	232,196,168.00	100.00	222,247,393	95.72	222,247,393	95.72	9,948,775	4.28	9,948,775	4.28
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	197,064,346.00	197,064,346.00	100.00	195,256,599	99.08	195,256,599	99.08	1,807,747	0.92	1,807,747	0.92
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	263,809,800.00	263,809,800.00	100.00	223,266,943	84.63	223,266,943	84.63	40,542,857	15.37	40,542,857	15.37
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	371,700,000.00	371,700,000	100.00	363,785,000	97.87	363,785,000	97.87	7,915,000	2.13	7,915,000	2.13
									-		-	
	JUMLAH	12,448,904,508.34	12,448,904,508	100.00	9,897,418,582	79.50	9,900,720,211	79.53	2,543,570,926	20.50	2,543,570,926	20.43

BIDANG KETERSESIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

NO.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D DESEMBER		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	13
1	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	1,955,798,547.00	1,955,798,547.00	100.00	1,942,473,737.92	99.32	1,955,798,547.00	100.00	13,324,809.08	0.68	13,324,809.08	0.68
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	22,326,800.00	22,325,800.00	100.00	20,762,204.00	92.99	22,326,800.00	100.00	1,563,596.00	7.00	1,564,596.00	7.01
3	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	35,000,850.00	35,000,850.00	100.00	34,322,500.00	98.06	35,000,850.00	100.00	678,350.00		678,350.00	1.94
4	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	18,165,300.00	18,165,300.00	100.00	17,648,658.00	97.16	18,165,300.00	100.00	516,642.00	2.84	516,642.00	2.84
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	35,587,000.00	35,587,000.00	100.00	32,577,000.00	91.54	35,587,000.00	100.00	3,010,000.00	8.46	3,010,000.00	8.46
6	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota	30,640,000.00	30,640,000.00	100.00	30,561,100.00	99.74	30,640,000.00	100.00	78,900.00	0.26	78,900.00	0.26
7	Neraca Bahan Makanan (NBM)	30,520,000.00	30,520,000.00	100.00	30,490,150.00	99.90	30,520,000.00	100.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.10
8	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	777,790,250.00	777,790,250.00	100.00	762,358,505.00	98.02	777,790,250.00	100.00	15,431,745.00	1.98	15,431,745.00	1.98
9	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	43,221,300.00	43,221,300.00	100.00	40,385,369.00	93.44	43,221,300.00	100.00	2,835,931.00	6.56	2,835,931.00	6.56
	JUMLAH	2,949,050,047.00	2,949,049,047	100.00	2,911,579,223.92	98.73	2,949,050,047	100.00	37,469,823.08	1.27	37,470,823.08	1.27

DISTRIBUSI CADANGAN PANGAN MASYARAKAT

NO.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D DESEMBER		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3		5	6	7	8	10	11	12	12	13
1	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	24,402,950.00	24,402,950.00	100.00	21,144,521	86.65	21,144,521	86.65	3,258,429	13.35	3,258,429	13.35
2	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	204,865,250.00	204,865,250.00	100.00	149,969,500	73.20	188,865,250	92.19	54,895,750	26.80	54,895,750	26.80
3	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	62,180,250.00	62,180,250.00	100.00	45,964,500	73.92	45,964,500	73.92	16,215,750	26.08	16,215,750	100.00
4	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	508,184,187.00	508,184,187.00	100.00	375,923,802	73.97	375,923,802	73.97	132,260,385	26.03	132,260,385	26.03
5	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	221,194,300.00	221,194,300.00	100.00	51,031,634	23.07	51,031,634	23.07	170,162,666	333.45	170,162,666	76.93
6	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	458,584,000.00	458,584,000.00	100.00	40,820,000	8.90	40,820,000	8.90	417,764,000	91.10	417,764,000	91.10
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	86,967,000.00	86,967,000.00	100.00	49,320,000	56.71	50,970,000	58.61	37,647,000	43.29	37,647,000	43.29
	JUMLAH	1,566,377,937.00	1,566,377,937	100.00	734,173,957	46.87	774,719,707	49.46	832,203,980	53.13	832,203,980	53.13

BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

NO.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET S/D DESEMBER		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			Rp	%	KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
					Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	13
1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal	65,610,000.00	65,610,000	100.00	20,555,580	31.33	20,555,580	31.33	45,054,420	68.67	45,054,420	68.67
2	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	609,873,350.00	609,873,350.00	100.00	555,034,153	91.01	555,034,153	91.01	54,839,197	8.99	54,839,197	8.99
3	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	137,053,262.33	137,053,262.33	100.00	122,403,901	89.31	122,403,901	89.31	14,649,361	10.69	14,649,361.33	10.69
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita Per Tahun	150,511,000.00	150,511,000.00	100.00	145,192,647	96.47	145,918,320	96.95	5,318,353	3.53	5,318,353.00	3.53
5	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	47,648,798.00	47,648,798.00	100.00	38,707,412	81.23	38,707,412	81.23	8,941,386	18.77	8,941,386.00	18.77
	JUMLAH	1,010,696,410.33	1,010,696,410	100.00	881,893,693	87.26	882,619,366	87.33	128,802,717	12.74	99,893,617	9.88

UPT PSMKP

NO.	U R A I A N	PAGU (Rp)	TARGET		REALISASI				DEVIASI		SISA ANGGARAN	
			S/D DESEMBER		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		KEUANGAN	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	12	13
1	Koordinasi dan Singkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Asal Tumbuhan	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	10,470,625.00	99.72	10,470,625.00	99.72	29,375.00	0.28	29,375.00	0.28
2	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	35,105,300.00	35,105,300.00	100.00	34,796,000.00	99.12	34,796,000.00	99.12	309,300	0.88	309,300	0.88
3	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	80,847,400.00	80,847,400.00	100.00	80,826,250.00	99.97	80,826,250.00	99.97	21,150.00	0.03	21,150	0.03
4	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan segar asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	149,803,600.00	149,803,600.00	100.00	146,582,903.00	97.85	146,582,903.00	97.85	3,220,697.00	2.15	3,220,697	2.15
5	Penguatan Kelembagaan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	145,020,900.00	145,020,900.00	100.00	138,751,101.00	95.68	144,494,000.00	99.64	6,269,799.00	4.32	6,269,799	4.32
6	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	16,327,300.00	16,327,300.00	100.00	16,055,307.00	98.33	16,055,307.00	98.33	271,993.00	1.67	271,993	1.67
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	1,961,432.00	93.40	2,100,000.00	100.00	138,568	6.60	138,568	6.60
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47,895,000.00	47,895,000.00	100.00	47,773,400.00	99.75	47,895,000.00	100.00	121,600.00	0.25	121,600	0.25
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57,162,000.00	57,162,000.00	100.00	55,335,899.00	96.81	55,335,899.00	96.81	1,314,380	3.19	1,826,101	3.19
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83,310,000.00	83,310,000.00	100.00	81,995,620.00	98.42	81,995,620.00	98.42	1,314,380	1.58	1,314,380	1.58
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18,600,000.00	18,600,000.00	100.00	18,550,320	99.73	18,550,320.00	99.73	49,680	0.27	49,680	0.27
	JUMLAH	646,671,500.00	646,671,500	100.00	633,098,857	97.90	639,101,924	98.83	12,981,867	2.10	13,522,963	2.09

Capaian Renstra Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis merupakan dokumen yang memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Indikator Kinerja berikut target yang ingin dicapai di tahun 2026 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja dari tujuan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2026
	Meningkatnya kualitas tata kelola	Indeks Reformasi Birokrasi	50
Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan (Skor)	89,40
		Skor Pola Pangan harapan Konsumsi (skor)	89,40
		Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100
		Inflasi Pangan Bergejolak (%)	5
	Meningkatnya Penanganan kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	13,6
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan (%)	100
	Meningkatnya pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan(%)	88

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Strategis Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah merupakan bagian integral dalam proses Perencanaan Pembangunan daerah Sulawesi Tengah dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Pangan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan rencana kerja di lingkungan Dinas pangan. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Dari Indikator kinerja sasaran diatas merupakan tolok ukur pencapaian pelaksanaan jangka menengah dan jangka panjang

Capaian Renstra dapat diukur keberhasilannya dari implementasi Rencana Strategis tahun 2025 diatas, Dinas Pangan menetapkan target kinerja yang harus dicapai. Target yang ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja sasaran maupun indikator tingkat kegiatan dapat dijabarkan pada tabel. 3; sebagai berikut :

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator		Target	Realisasi	Target 2026
Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah				8	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				8	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya Jumlah Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Kab/ Kota		0	
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Unit		0	
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia	Unit	0		
Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia	Unit	0		
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit	11	11	
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	1	1	
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan	Dokumen	0		
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Unit	1	1	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	86	87,53	
	Presentase Penguatan Cadangan Pangan minimal 370 ton	%	175	0	
	Energi Perkapita/hari	kkl/kap/hari			
	Protein Perkapita/hari	kkl/kap/hari			
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam stabilisasi Pasokan dan Harga	Laporan	1	1	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	0		
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	1	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Laporan	0		
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	0		
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen	1	1	
Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			1	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Laporan	1	1	
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di provinsi			1	1	
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi			1	1	
Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit	1	1	
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan	1	1	
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)			1	1	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi	Ton		1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Laporan	0		
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen	0		
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	0		
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	0		
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	1	1	
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			18	-	
Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Penentuan Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal yang tidak di Tetapkan oleh pemerintah Pusat	Dokumen		-	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan			

Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Promosi Pencapaian Target Konsumsi pangan Perkapita Pertahun sesuai dengan AKG	Dokumen	3	3	
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	1	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	1	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Presentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan Pangan (Beras)	%	3	3	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Jumlah Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan	Dokumen	1	1	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota	Dokumen	1	1	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Dokumen	2	2	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	0		
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	
Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen	1	1	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Indeks Reformasi Birokrasi		65	35.6	
				-	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	15	6	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Dokumen	7	3	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	2	2	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	2	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		2	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	60		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		-	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		-	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		2	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		-	

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		-	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		-	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi dalam peningkatan SDM pegawai	Dokumen		0	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		-	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen		-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		-	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rapat Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		3	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		-	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		-	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		-	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		-	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		-	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		1	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		-	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		-	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	1	-	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		-	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan		2	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		-	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		-	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		100	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	47	1	

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		-	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		-	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	175	98	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit		-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		-	

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dari tujuan

Pada tabel tersebut diatas dapat dilihat berbagai capaian dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di dalam mengemban tugas dan fungsinya dalam kurun waktu 2025-2029 yang telah diukur dari indikator capaian sasaran.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Ketahanan Pangan merupakan suatu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, untuk Provinsi Sulawesi Tengah program ketahanan pangan telah dimasukkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang merupakan kelanjutan pembangunan ketahanan pangan di Sulawesi Tengah pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu arah kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan kedepan tidak terlepas dari kondisi capaian pembangunan ketahanan pangan yang telah dihasilkan sebelumnya, namun keberhasilan-keberhasilan yang dicapai masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dengan pencapaian akhir bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan-permasalahan ketahanan pangan yang timbul selama ini bersumber dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal diantaranya kekuatan yang belum diberdayakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak termanfaatkan dan ancaman yang tidak terantisipasi.

Perencanaan kedepan, permasalahan pemantapan ketahanan pangan dapat terpecahkan, sehingga tiap-tiap permasalahan perlu diidentifikasi dan diverifikasi sebagai faktor-faktor pemicu dan penentu keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan. Faktor-faktor penentu keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor lainnya yang mempunyai daya ungkit tinggi dalam pemecahan permasalahan dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pemantapan ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan mendasar yang perlu terus diupayakan solusi pemecahannya masalahnya. Adapun permasalahan yang sifatnya internal maupun eksternal dan masuk dalam kategori persoalan klasik adalah sebagai berikut :

1. Masih sangat tergantung pada salah satu komoditas pangan pokok yaitu beras, sehingga program penurunan konsumsi beras sangat sulit tercapai
2. Masih rendahnya akses pangan masyarakat yang diakibatkan karena rendahnya daya beli dan pendapatan.
3. Masih terdapat penduduk yang terindikasi penduduk rawan pangan dan rumah tangga miskin, meskipun telah menunjukkan trend yang menurun.
4. Pengembangan kelembagaan lumbung pangan belum berkelanjutan.
5. Dewan Ketahanan Pangan belum maksimal melakukan kegiatannya terutama dalam hal advokasi pangan.
6. Belum maksimalnya system penyediaan pangan yang aman dikonsumsi oleh masyarakat sehingga masih terdapat sekitar 70 % pangan segar yang beredar dimasyarakat mengandung residu pestisida.
7. Produsen (petani dan pengusaha) pangan segar belum menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dalam system usaha taninya.
8. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan segar yang aman dikonsumsi.

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wujud implementasi terhadap rancangan yang telah ditetapkan sebelumnya

dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk mengetahui sejauh mana substansi RKPD telah dimasukkan dalam Renja Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Review Rancangan Rencana Kerja 2026

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja Dan Kerangka Pendanaan tahun 2026		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Target	Pagu Indikatif (Rp)
2					3	4	8	9	15	16
					Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah			25.353.180.811,02		62.743.084.500,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			25.353.180.811,02		62.743.084.500,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			25.353.180.811,02		62.743.084.500,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (PANGAN)	70,05 Indeks	22.453.225.984,74	-	16.071.358.500,00
					[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
2	09	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
2	09	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
2	09	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					

2	09	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
2	09	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
2	09	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	199.316.668,00			345.000.000,00
2	09	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
2	09	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
2	09	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
					-	-	-	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	0,00			86.000.000,00
					[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]					
2	09	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					

2	09	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					
					-	-	-	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
2	09	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
					[Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
2	09	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
					-	-	-	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					

						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	0,00		35.650.000,00
2	09	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00		35.765.000,00
					[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	59.999.750,00		28.060.000,00
2	09	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00		104.650.000,00
					-					
2	09	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					
2	09	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi dalam peningkatan SDM pegawai	3 Dokumen	0,00	-	696.714.000,00
2	09	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0,00		345.864.000,00

2	09	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
					[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0,00		80.500.000,00
					-					
2	09	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					
					[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00		195.500.000,00
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	09	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					

2	09	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0 Dokumen	0,00		45.425.000,00	
2	09	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
2	09	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel					
2	09	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	82.357.900,00		172.500.000,00	
2	09	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Laporan	333.000.540,00	-	1.868.750.000,00
2	09	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	233.000.000,00		517.500.000,00	
					-					
2	09	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
					[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.540,00		776.250.000,00	

2	09	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
2	09	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
2	09	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
					-	-	-	22.453.225.984,74		16.071.358.500,00
2	09	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00			300.000.000,00
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					
					[Meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan]	Persentase Pemenuhan Infrastruktur untuk mendukung Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100	419.999.958,00		23.161.929.000,00
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi					
2	09	02	1.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya					
2	09	02	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik					

2	09	02	1.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi inflasi Pangan Bergejolak Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Konsumsi	100 % 5 % 87 Skor 90.40 Skor	2.199.922.848,28	-	19.309.797.000,00
					[Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat]					
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam stabilisasi Pasokan dan Harga	4 Laporan	1.589.937.483,28	-	10.150.000.000,00
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					
2	09	03	1.01	0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					

2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis					
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi					
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	975.000.000,00			2.300.000.000,00
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi					
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	70.000.000,00			1.000.000.000,00
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi					
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	70.000.000,00			345.000.000,00
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)					
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	59.999.000,00			230.000.000,00
2	09	03	1.01	0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi					
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	65.000.000,00			287.500.000,00
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					

2	09	03	1.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal					
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	0,00		487.857.000,00
2	09	03	1.02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	0 Ton	0,00		150.000.000,00
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					
						Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	200 Ton	70.000.000,00		500.000.000,00
2	09	03	1.02	0007	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					
						Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	200 Ton	299.986.665,00		2.990.000.000,00
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi					
						Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	0,00		115.000.000,00
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi					
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
								90.000.000,00		1.639.440.000,00
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan	59.999.700,00		2.185.000.000,00
2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun					
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	89.999.000,00		1.092.500.000,00

2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					
					[Meningkatkan penanganan kerawanan pangan]	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	13.6	280.032.020,00		4.200.000.000,00
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi					
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota					
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	70.007.500,00		600.000.000,00
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi					
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					
2	09	04	1.02	0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi					
						Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen	70.015.200,00		1.500.000.000,00
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi					
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	0,00		200.000.000,00

2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi					
					UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan			616.649.308,00		2.166.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			616.649.308,00		2.166.000.000,00
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			616.649.308,00		2.166.000.000,00
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
					[Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Perangkat Daerah]	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50	281.370.558,00		648.500.000,00
2	09	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
2	09	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
2	09	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
2	09	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					

					[Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan]	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	88	335.278.750,00		1.517.500.000,00
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kab/Kota	4 Dokumen	335.278.750,00	-	1.517.500.000,00
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan					
						Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	80 Sertifikat	70.016.500,00		400.000.000,00
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan					
						Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	70.140.000,00		300.000.000,00
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
						Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	80.000.000,00		300.000.000,00
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu					

					pangan segar asal tumbuhan				
						Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	80.000.050,00	402.500.000,00
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				
						Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	0,00	0,00
2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				
						Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	35.122.200,00	115.000.000,00

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaan Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintah telah menetapkan kebijakan secara nasional yang harus menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah mulai dari pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai Isu strategis telah diangkat sebagai referensi dalam menetapkan arah dan tujuan pembangunan Nasional yang juga merupakan pengayaan terhadap kondisi lingkungan eksternal yang terkait langsung dengan pencapaian pembangunan ketahanan pangan selama 5 (lima) tahun kedepan. Masalah dan tantangan yang masih dihadapi dimasa datang diantisipasi dengan melakukan identifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program, serta RPJMN dan RPJMD sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan oleh masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam jangka menengah. Isu-isu yang dihasilkan dari identifikasi telah dirumuskan dan dipilih secara nasional, regional, maupun daerah antara lain :

ISU NASIONAL

Isu nasional saat ini terkait ketahanan pangan

KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI DAN BERDAULAT

Undang-undang No 18 Tahun 2012 secara tegas mengamanatkan perlunya Indonesia membangun ketahanan pangan mandiri dan berdaulat. Ketahanan Pangan (food security) adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan

produktif secara berkelanjutan.

Ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan sesuai dengan UU No 8/2012 yaitu: (a) kecukupan ketersediaan pangan; (b) stabilitas ketersediaan pangan, (c) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan, dan (d) kualitas/keamanan pangan. Indikator keberhasilan membangun ketahanan pangan dapat diukur dari kombinasi keempat komponen tersebut.

KEMANDIRIAN PANGAN

Kemandirian Pangan (food resilience), adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat (UU 18 Tahun 2012).

Kemandirian mengacu kepada peningkatan kemampuan negara dan bangsa untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang beragam yang bersumber dari dalam negeri melalui pendayagunaan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal secara optimal. Kemandirian dicirikan oleh tiga hal pokok yaitu: (a) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal, (b) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (c) pemanfaatan pangan.

KEDAULATAN PANGAN

Kedaulatan Pangan (food sovereignty), adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Istilah kedaulatan pangan lebih kepada penegasan bahwa sebagai negara merdeka dan berdaulat maka Indonesia mempunyai kebebasan secara berdaulat kedaulatan untuk menentukan strategi, kebijakan dan program serta sistem pangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tidak dapat diatur, didikte atau diintervensi oleh negara.

STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN YANG MANDIRI DAN BERDAULAT

Atas dasar permasalahan, tantangan dan keinginan untuk pencapaian ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat, dapat dirumuskan dalam enam program utama, yaitu: (1) peningkatan penyediaan pangan melalui pemanfaatan sumber daya domestik, (2) penguatan cadangan pangan, (3) pengelolaan perdagangan pangan bagi kepentingan nasional, (4) penanganan kerawanan pangan kronis dan transien, (5) pengembangan diversifikasi konsumsi pangan, dan (6) perbaikan sistem mutu dan gizi pangan

ISU REGIONAL SULAWESI

Pembangunan wilayah Sulawesi diarahkan untuk menjadi salah satu penghasil pangan utama untuk menopang kebutuhan pangan secara nasional dengan meningkatkan produktifitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, mengembangkan bio-energi serta meningkatkan dan memperluas perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf internasional.

Beberapa isu strategis di wilayah Sulawesi, yaitu sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi diakibatkan

kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan kerawanan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku

lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganeekaragaan konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA)

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 OPD Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah adalah mendorong terwujudnya kedaulatan, kemandirian pangan wilayah secara berkelanjutan yang diimplementasikan pada beberapa kegiatan utama yang terdiri atas :

- 1) Kelembagaan yang handal dalam Pemantapan Ketahanan Pangan, *melalui* ;
 - a). *Peningkatan Penguatan Cadangan Pangan*
 - b). *Ketersediaan Informasi distribusi /Pasokan, Harga dan Akses Pangan Daerah.*
 - c). *Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.*
 - d). *Pengurangan konsumsi Beras melalui Penganeekaragaman konsumsi Pangan.*
 - e). *Penanganan daerah rawan pangan*
- 2) Menyiapkan tenaga yang kompeten, profesional dalam mengelola ketahanan pangan

- 3) Menciptakan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.
- 4) Mewujudkan dukungan dana dalam penyelenggaraan urusan di bidang pangan.
- 5) Penyelenggaraan kegiatan koordinasi antar pusat dan daerah dapat terintegrasi dengan baik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 terdiri atas program prioritas nasional dan program prioritas daerah. Adapun program/kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

- a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
- c. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- d. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- e. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- f. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
- g. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- h. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
- j. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- k. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- l. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per

Tahun

3. Program Penanganan Rawan Pangan

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- c. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

4. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

5. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

6. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

7. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

8. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

9. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

10. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

11. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Penguatan Jejaring

Keamanan Pangan

- b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- c. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- d. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- e. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Rencana Alokasi Anggaran pada OPD Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dipergunakan untuk membiayai program-program Dinas Pangan serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Dinas Pangan.

BAB IV. PENUTUP

Dengan adanya regulasi dimaksud maka setiap daerah harus mampu membangun sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dengan program pembangunan lainnya ditingkat daerah. Terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan wilayah sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, akan sangat ditentukan oleh dukungan pemerintah daerah baik melalui regulasi daerah maupun alokasi anggaran kegiatan yang proporsional. mengingat peran dan fungsi Dinas Pangan Propinsi Sulawesi Tengah semakin strategis ditengah meningkatnya persoalan pemenuhan pangan secara cukup, aman dan terjangkau. Dukungan anggaran secara proporsional untuk urusan ketahanan pangan akan mendorong tercapainya pelayanan dasar masyarakat serta mengurangi indikasi meningkatnya penduduk rawan pangan.

Konsistensi dukungan anggaran APBD terhadap program dan kegiatan ketahanan pangan sebagaimana yang ada dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 akan sangat menentukan capaian indicator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dimana secara jangka panjang akan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun yaitu Berani mewujudkan Sulawesi Tengah menjadi Daerah Pertanian dan Industri yang Maju dan berkelanjutan 2025- 2029” melalui pendekatan 9 Berani. Fokus utama meliputi penguatan sektor pertanian/ perkebunan, peningkatan SDM, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, tata kelola Pemerintah dan Investasi.

